

# REVITALISASI SEKTOR PARIWISATA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH: PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN MELALUI PERSPEKTIF EKONOMI TERPADU

(Kasus Pangandaran)

Oleh:

Sri Hayati

## ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai dua implikasi besar, yakni, *pertama*, pemberdayaan daerah kabupaten/kota sebagai suatu kesatuan administrasi yang otonom dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan daerah propinsi. Pariwisata merupakan sektor bisnis yang mampu meningkatkan pendapatan daerah pada dasa warsa terakhir ini. Pada saat ini pertumbuhan pariwisata dunia menunjukkan kemantapan dengan dampak ekonomi yang besar, menantang, dan menjanjikan masa depan yang cerah. Pangandaran merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang terletak di pantai Selatan Jawa Barat, secara administratif termasuk ke kabupaten Ciamis. Luas wilayah ini sekitar 5000 hektar dengan jumlah rumah tangga sebanyak 6.670 buah yang tersebar di atas Tombolo yang menyatukan Taman Nasional Hutan Pananjung dengan pulau Jawa. Sesuai dengan karakteristik daerah Pangandaran, menurut Harris dan Nelson (1993) terdapat tiga tipe kegiatan yang dapat dilakukan di Pangandaran, yaitu: (1) Kegiatan pariwisata yang bersifat rekreasi dengan produk sun, sand, dan sea; (2) Pariwisata yang menampilkan *pictureresque* atau *local color* ; dan (3) Pariwisata yang bersifat ekoturisme. Strategi pengawasan pariwisata dalam perspektif ekonomi terpadu meliputi beberapa aspek sebagai berikut: (1) perubahan hak milik lahan, (2) perubahan pengelolaan pariwisata, (3) aksesibilitas terhadap training, (4) terdapat hubungan antara wisatawan dengan aktivitas masyarakat, dan (5) batasan pengontrolan masyarakat

## A. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai dua implikasi besar, yakni, *pertama*, pemberdayaan daerah kabupaten/kota sebagai suatu kesatuan administrasi yang otonom dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan daerah propinsi. *Kedua*, sebagai suatu kesatuan administrasi yang otonom, daerah kabupaten/kota bertanggung jawab kepada pemerintah propinsi atau pusat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sektor publik yang diotonomikan. Konsekuensi dari kedua implikasi tersebut adalah pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melaksanakan program-program pembangunannya. Dalam hal sumber dana APBD, daerah mempunyai dua sumber, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan subsidi pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan upaya daerah yang bersangkutan.

Pariwisata merupakan sektor bisnis yang mampu meningkatkan pendapatan daerah pada dasa warsa terakhir ini. Pada saat ini pertumbuhan pariwisata dunia menunjukkan kemantapan dengan dampak ekonomi yang besar, menantang, dan menjanjikan masa depan yang cerah. Sampai dengan tahun 2005 perjalanan dan pariwisata akan menciptakan lapangan kerja sebesar 144 juta. Hampir 11% belanja perkapita dialokasikan untuk sektor pariwisata (Naisbitt, 1994). Menurut data WTO (*World Tourist Organization*) tahun 1994 peningkatan jumlah wisatawan dunia mencapai hampir 300% antara tahun 1972-1992, yaitu dari 160 juta menjadi 450 juta wisatawan atau 8% dari populasi dunia. Proyeksi tahun 2000, jumlah wisatawan akan mencapai 637 juta, 114 juta di antaranya berada di kawasan Asia Pasifik (Kompas, Desember 1994). Pertumbuhan wisatawan untuk kawasan ini cukup tinggi rata-rata sekitar 8,6%, khusus Asean sekitar 8.75%.

Fenomena lain dari pariwisata adalah merupakan sosok bisnis besar yang bukan tanpa risiko seperti yang diungkapkan oleh Daniel yang dikutip oleh Wahyudin (Kompas, 7 Januari 1995): "*Tourism emits no smokes, but pollution comes in many forms*". Kekhawatiran terbesar bagi setiap negara adalah dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata bagi lingkungan. Tiap negara dipacu untuk meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata, tetapi di sisi lain ada kekhawatiran akan timbul dampak negatif. Peningkatan pariwisata massal yang terjadi seperti digambarkan di atas, menimbulkan kekhawatiran penurunan kualitas lingkungan dan tercampakkannya ciri-ciri budaya setempat (Naisbitt, 1994). Kecemasan terhadap penurunan sumberdaya alam sebagai modal dasar pariwisata pada umumnya akibat dari terjadinya booming wisata yang saat ini tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan tertentu, melainkan sudah merambah ke berbagai kawasan dalam skala yang lebih luas.

Kecenderungan meningkatnya kesadaran masyarakat dunia terhadap keberlanjutan lingkungan hidup seperti yang tertuang dalam komitmen politik Agenda-21 mengenai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), berdampak pula pada perubahan pola pariwisata. Bentuk pariwisata massal yang selama ini dilakukan dengan berbagai dampak yang ditimbulkan nampaknya akan bergeser pada pariwisata yang berwawasan lingkungan. Kecenderungan pemikiran tersebut, di masa yang akan datang akan menyisihkan kegiatan pariwisata massal (Naisbitt, 1994). Bentuk pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip di atas adalah kegiatan pariwisata yang bersifat rekreasi, pendidikan, konservasi, dan ekonomis. Pada kegiatan ini wisatawan tidak sekedar dapat berekreasi ke kawasan pariwisata semata, melainkan juga dapat menjaga, dan menikmati keberadaan alam tersebut dengan segala manifestasi di dalamnya. Wisatawan dalam hal ini dapat belajar dan berapresiasi terhadap alam, budaya, bahkan kehidupan ritual masyarakat setempat. Kesadaran yang didasarkan oleh pemahaman terhadap kondisi lingkungan yang berorientasi pada konservasi dan kepedulian terhadap budaya serta peradaban penduduk setempat merupakan hal yang menonjol dalam pelaksanaan pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pada umumnya pariwisata berwawasan lingkungan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di berbagai kawasan pariwisata di Indonesia. Di samping diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan yang lebih terarah pada pelaksanaannya, juga memerlukan suatu perencanaan yang matang. Lebih jauh, pada umumnya peluang bisnis yang menjanjikan dari pariwisata berwawasan lingkungan belum dapat dilihat. Untuk itu, diperlukan suatu

kajian yang dapat memberikan informasi mengenai peluang bisnis dari pariwisata yang berwawasan lingkungan agar pihak pengelola dapat melaksanakan secara optimal dengan memegang prinsip yang telah ditentukan.

## **B. PANGANDARAN SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA YANG POTENSIAL**

Pangandaran merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang terletak di pantai Selatan Jawa Barat, secara administratif termasuk ke kabupaten Ciamis. Luas wilayah ini sekitar 5000 hektar dengan jumlah rumah tangga sebanyak 6.670 buah yang tersebar di atas Tombolo yang menyatukan Taman Nasional Hutan Pananjung dengan pulau Jawa. Menurut Van Bemmelen (1968), secara fisiografis Pangandaran termasuk ke dalam zona Pegunungan Selatan (*Southern Mountains Zone*). Karakteristik utama dari zona ini adalah terjadinya proses pengangkatan yang masih berlangsung sampai saat ini. Hal ini memberikan konsekuensi terhadap daerah yang bersangkutan sebagai berikut:

- (1) Dasar pantai yang terangkat akan mengikutsertakan komponen yang dimilikinya seperti batu karang, gua laut, taman laut, dan sebagainya. Ciri tersebut menjadi bagian dari keberadaan pantai tersebut;
- (2) Jika batuan mengandung kapur, daerah tersebut merupakan daerah karst yang memiliki sifat mudah larut dalam air, lapisan tanah yang tipis, dan sungai bawah tanah. Jenis batuan ini rentan terhadap erosi dan abrasi;
- (3) Pengangkatan dasar laut menghasilkan daerah yang memiliki daya tarik yang mempesona yang tidak dimiliki oleh pantai lainnya, seperti terdapat gua laut dan sungai bawah tanah yang muncul ke permukaan. Selain itu, aktivitas yang dapat dilakukan di pantai semacam ini lebih unik dan beraneka dibandingkan dengan pantai lainnya.

Ketiga hal tersebut dapat dijumpai di pantai pangandaran disertai dengan sedimen Tombolo yang mempersatukan daratan pulau Jawa dengan pulau Pananjung. Aktivitas pariwisata pangandaran termasuk penginapan dan pasar pelelangan ikan sebagian besar berada di Tombolo, sebagian lagi di Taman Nasional Pananjung yang terletak di pulau Pananjung. Pangandaran memiliki syarat sebagai daerah pariwisata yaitu:

- (1) Pengunjung dapat melihat panorama pantai Pangandaran beserta karakteristiknya, juga atraksi penduduk baik kegiatan ritual sehari-hari sebagai nelayan maupun atraksi kesenian daerah setempat yang merupakan asimilasi antara kesenian Jawa Barat dan Jawa Tengah;
- (2) Pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas selain berenang, diantaranya menyusuri keindahan Taman Nasional Pananjung dengan beberapa gua di dalamnya, batu layar, dan berbagai tumbuhan yang tumbuh di daerah tersebut. Selain itu, dengan perahu bermotor dapat mengelilingi pulau Pananjung dan melihat Taman Laut dengan terumbu karang yang dapat dilihat dengan mata telanjang dari atas perahu, juga dengan menyewa sepeda pengunjung dapat bersepeda mengelilingi Tombolo melalui kebun coklat dan ketapang yang tersebar di daerah tersebut; dan

- (3) Pengunjung dapat memilih berbagai makanan laut yang masih segar dan langsung dimasak sesuai dengan selera. Untuk dibawa pulang berbagai jenis ikan yang dikeringkan, gula aren, dan makanan lain yang khas daerah tersebut. Berbagai cinderamata dari daerah sekitarnya seperti kerajinan lokan dari mulai asesoris wanita sampai dengan interior tersedia di sana. Fasilitas komunikasi seperti kantor pos dan telekomunikasi dengan mudah didapat di sana.

Masyarakat setempat turut berpartisipasi dalam arti turut serta menikmati keberadaan pantai secara ekonomis sejalan dengan pesatnya perkembangan pantai Pangandaran sebagai daerah pariwisata. Mereka mendirikan hotel yang berskala besar bagi yang bermodal besar, serta penginapan kecil atau bahkan menyewakan rumah tinggal bagi yang bermodal lebih kecil. Di samping itu juga memberikan pelayanan fasilitas pariwisata seperti menyewakan baju renang, berjualan makanan atau cinderamata, menyewakan ban mandi, perahu, dan sepeda.

### **C. PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN PANGANDARAN**

Sesuai dengan karakteristik daerah Pangandaran, menurut Harris dan Nelson (1993) terdapat tiga tipe kegiatan yang dapat dilakukan di Pangandaran, yaitu:

- (1) Kegiatan pariwisata yang bersifat rekreasi dengan produk sun, sand, dan sea, terletak di pantai Barat dan pasir putih. Pengunjung dapat menikmati pantai Barat yang landai dengan ombak yang relatif tenang dan pantai yang landai. Di daerah ini terdapat pasar seni, diskotik, dan penginapan. Pengunjung yang relatif ingin menjauh dari keramaian dapat menikmati pasir putih yang terletak agak ke Timur untuk berjemur dan menikmati kerimbunan pepohonan Taman Nasional Pananjung.
- (1) Pariwisata yang menampilkan *pictureesque* atau *local color* di pantai Timur. Pengunjung dapat memilih sendiri udang, kepiting, dan ikan yang segera dimasak sesuai dengan selera. Ketika nelayan menjaring ikan secara komunal merupakan atraksi yang menarik bagi wisatawan lokal dan Internasional.
- (2) Pariwisata yang bersifat ekoturisme terletak di pantai Timur dan Taman Nasional Pananjung. Di daerah ini pengunjung dapat mengamati berbagai jenis tumbuhan yang terdapat di Taman Nasional yang merupakan kebun botani. Taman Nasional Pananjung juga merupakan laboratorium alam yang efektif bagi bidang studi tertentu seperti Biologi, Geografi, dan Geologi. Dengan demikian pengunjung di daerah ini dapat melakukan kegiatan yang bersifat pendidikan di samping rekreasi, juga turut serta dalam konservasi daerah ini sehingga kerentanan yang dimiliki tidak semakin rawan dengan adanya wisatawan.

Pengembangan pantai Pangandaran seperti halnya daerah pariwisata lainnya dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang merugikan pantai ini dalam jangka panjang, antara lain:

- (1) Sejalan dengan perkembangan wisatawan di pantai Barat, maka terjadi pemindahan aktivitas nelayan dari pantai Barat ke pantai Timur. Padahal di pantai Timur nelayan mengalami kesulitan dalam melautkan perahu dibandingkan dengan di pantai Barat. Dalam hal ini nelayan dibatasi aktivitasnya hanya diperbolehkan di pantai Timur yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi daripada pantai Barat.

- (2) Meskipun sudah ada ketentuan bahwa pantai Timur untuk aktivitas nelayan dan pantai Barat untuk aktivitas wisatawan, namun pembangunan hotel telah merambah sepanjang pantai Timur. Hotel-hotel tersebut didirikan bergesekan dengan tempat nelayan melaut dan memarkir perahunya, juga mengganggu sosialisasi di antara para nelayan.
- (3) Lahan-lahan yang ada di Pangandaran saat ini banyak dimiliki oleh penduduk di luar daerah tersebut seperti Bandung dan Jakarta.
- (4) Pedagang asong dipindahkan dari pantai Barat, sehingga wisatawan dapat menikmati pantai lebih baik.

Jika Pangandaran dijadikan Bali kedua, maka yang menjadi masalah utama di sini adalah pengadaan air bersih dan pembuangan limbah. Nelayan dalam jaringnya selalu terdapat botol plastik, kaleng minuman, dan sampah lainnya yang dibuang ke pantai.

#### **D. STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN MELALUI PERSPEKTIF EKONOMI TERPADU**

Strategi pengembangan pariwisata dalam prespektif ekonomi terpadu pada dasarnya merupakan keterpaduan antara kesabijaksanaan, humanis, dan ekologis. Industri pariwisata berkelanjutan dapat dilihat dari pengaruh ekonomi, sosial dan lingkungan bagi masyarakat setempat yang berlandaskan pada enam prinsip yang dikembangkan oleh Robertson (1978), de Romana (1989) serta Ross dan Usher (1986). Asumsi yang dikembangkan adalah bahwasanya ekonomi termasuk di dalamnya pariwisata merupakan salah satu komponen dari masyarakat berkelanjutan. Jika pariwisata yang ada tidak berdampak secara berkelanjutan terhadap masyarakat maka industri pariwisata itu sendiri tidak berkelanjutan.

Keenam prinsip tersebut adalah: (1) memajukan perekonomian secara seimbang antara sektor pasar dan non-pasar dalam hal ini pemilik, pekerja, dan pendidikan; (2) mendorong mencari alternatif bentuk jenis pekerjaan yang mandiri, personal dan kontrol lokal, kemampuan umum, tujuan intrinsik, bersifat informal, dan keseimbangan antara pekerja wanita dan laki-laki; (3) memajukan pembangunan yang berdasarkan sumber asli seperti sistempengetahuan lokal dan tradisional, bentuk organisasi lokal seperti LKMD, dan keahlian lokal; (4) memajukan perdagangan antar daerah dan menjamin terpenuhinya kebutuhan sendiri; (5) menjaga keanekaragaman budaya atau masyarakat; dan (6) menjaga jarak sosial di luar masyarakat industri modern yang tidak termasuk ke dalam kategori ekonomis.

Berkaitan dengan strategi pengembangan pariwisata dalam prespektif ekonomi terpadu di Pangandaran, maka keterpaduan berbasis ekonomi, masyarakat dan lingkungan ini dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar selain nilai ekonomis didapat oleh masyarakat setempat dan pengelola pariwisata, juga kesinambungan pariwisata di Pangandaran dapat berlangsung dengan baik. Strategi pengembangan pariwisata dalam perspektif ekonomi terpadu meliputi beberapa aspek seperti diuraikan sebagai berikut.

### **(1) Perubahan hak milik lahan**

Perubahan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perubahan hak milik lahan non-penduduk menjadi hak milik lahan penduduk dan perubahan perbandingan hak milik perorangan menjadi hak milik masyarakat. Kepemilikan lahan ini menjadi jaminan terhadap penduduk setempat untuk mengelola lahannya sesuai dengan peruntukan tanpa adanya konflik dengan kepentingan dan kepemilikan yang lain. Kepemilikan masyarakat menjadi penting manakala lahan tersebut memiliki daya dukung yang terbatas, seperti halnya pada Tombolo di Pangandaran yang menjadi pusat kegiatan bisnis pariwisata di daerah tersebut. Jika kepemilikan lahan pribadi lebih banyak daripada kepemilikan lahan masyarakat, maka kepentingan pribadi akan lebih banyak menentukan, sehingga pola peruntukan sebagai daerah pariwisata berwawasan lingkungan tidak akan terkendali. Namun demikian, perubahan yang diharapkan terutama rasio antara kepemilikan lahan pribadi menjadi kepemilikan lahan masyarakat tidak akan terwujud apabila tidak ada kepercayaan masyarakat secara individu terhadap pengelola dan pemegang wewenang. Hal ini, dibutuhkan pendekatan tradisional dalam arti pemuka masyarakat dan pemuka adat setempat merupakan kunci untuk membuka jalan ke arah tersebut. Di samping itu, dimungkinkan adanya tanah ulayat yang telah menjadi lahan pribadi penduduk setempat yang dapat dikembalikan menjadi lahan masyarakat.

### **(2) Perubahan pengelolaan pariwisata**

Aspek yang berhubungan dengan hal tersebut antara lain adalah perubahan kepemilikan antar kelompok termasuk di dalamnya pemerintah setempat, wara laba, dan kelompok di luar penduduk setempat, dan penduduk setempat. Demi keberlanjutan pariwisata yang ada di Pangandaran, maka pengelolaan yang dilakukan selama ini seyogyanya dilakukan perubahan ke arah pariwisata berwawasan lingkungan daripada pariwisata massal. Hal ini dilakukan, agar terdapat petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan standar Internasional sehingga wisatawan manca negara akan lebih merespon produk wisata yang ditawarkan. Di samping itu, selama ini pengelolaan pariwisata yang dilakukan di Pangandaran masih berorientasi kepada kuantitas pengunjung dari pada proteksi pariwisata dalam jangka waktu yang panjang. Kendala yang dihadapi dalam perubahan ini antara lain pengelola belum sepenuhnya mengerti akan pentingnya pariwisata yang berorientasi kepada konservasi lingkungan, juga tidak terdapat petunjuk operasional yang dapat dilaksanakan langsung di daerah tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan: (1) penyuluhan atau training mengenai pariwisata berwawasan lingkungan termasuk di dalamnya peluang keuntungan yang dapat diperoleh melalui kegiatan tersebut, dan (2) dibuat kebijakan yang operasional untuk daerah Pangandaran dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan.

### **(3) Aksesibilitas terhadap Training**

Penduduk setempat dan pengelola diharapkan memiliki aksesibilitas terhadap peningkatan diri yang dapat memacu pengembangan pariwisata di Pangandaran. Berbagai penyuluhan maupun pendidikan informal lainnya yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata dapat dikembangkan di sini. Kerjasama dapat dilakukan antara

lain dengan Departemen Pariwisata, pengelola pariwisata, biro KLH, LSM, dan perguruan tinggi setempat. Bentuk penyuluhan yang dapat dilakukan di Pangandaran antara lain penyuluhan pedoman pariwisata berwawasan lingkungan, petunjuk pengelolaan pariwisata yang berstandar lingkungan, peningkatan keterampilan kerajinan setempat, pembuatan kemasan produk setempat, dan pembinaan kesenian daerah. Kendala yang dihadapi dalam hal ini antara lain belum terdapat kerjasama yang terjalin antar lembaga yang dikemukakan di atas, penyuluhan yang telah dilakukan di sini bersifat insidental dalam arti tidak sistematis dan berkesinambungan. Dengan demikian hasil yang diperoleh dari proses tersebut tidak pernah tampak. Untuk itu perlu dibentuk suatu lembaga yang dapat menaungi peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang berhubungan dengan pariwisata bagi penduduk setempat, agar pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara bersama-sama dan terarah dalam satu persepsi serta tujuan yang sama.

#### **(4) Terdapat hubungan antara Wisatawan dengan aktivitas masyarakat**

Wisatawan dalam era sekarang tidak hanya membutuhkan rekreasi semata tanpa mengindahkan lingkungan sekitarnya, melainkan membutuhkan keikutsertaan dalam aktivitas masyarakat di mana ia melakukan kegiatan pariwisata. Untuk itu dibutuhkan suatu jalan yang dapat menghubungkan aktivitas wisatawan dengan aktivitas formal maupun informal masyarakat setempat. Hal yang dapat dilakukan di Pangandaran antara lain adalah aktivitas ritual nelayan yang baru turun dari perahu serta menarik jaring secara bersama-sama dapat mengikutsertakan wisatawan untuk mencobanya. Selain itu, aktivitas memilih ikan, udang, dan kepiting segar dan memasak bersama-sama pemilik warung merupakan hal yang dapat dilakukan wisatawan. Kegiatan tersebut kemungkinan dapat mengganggu masyarakat setempat dalam aktivitasnya jika mereka tidak diberikan kompensasi dari kebersamaan tersebut. Untuk itu perlu ada standar yang baku kompensasi apa yang harus diberikan wisatawan apabila ia larut dalam aktivitas penduduk setempat, agar penduduk setempat tidak merasa terganggu.

#### **(5) Batasan pengontrolan masyarakat**

Batasan pengontrolan ini dilakukan di mana pariwisata dihadapkan pada konflik atau kendala berupa kehidupan pribadi, integritas lingkungan, nilai spiritual, dan nilai estetik. Masyarakat dalam hal ini sebaiknya memiliki batas kewenangan untuk melakukan pengontrolan terhadap berbagai aktivitas penduduk setempat dan wisatawan yang dapat merusak lingkungan fisik dan sosial setempat. Selain itu, masyarakat setempat diberi kesempatan untuk mengelola konflik yang berkenaan dengan isu pariwisata berwawasan lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menemukan dan memahami bahwa pariwisata berbasis lingkungan merupakan hal yang baik bagi konservasi lingkungan dan mendatangkan keuntungan bagi mereka.

### **E. PENUTUP**

Pangandaran sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata memegang peran yang cukup signifikan dalam kerangka otonomi daerah setempat. Hal ini disebabkan

pemberlakuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memiliki implikasi terhadap pemberdayaan daerah kabupaten/kota sebagai suatu kesatuan administrasi yang otonom. Konsekuensi dari kedua implikasi tersebut adalah pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melaksanakan program-program pembangunannya. Untuk itu, strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan dalam perspektif ekonomi terpadu seyogianya dapat diterapkan secara simultan dari berbagai pihak yang terkait. Hal ini disebabkan strategi ini pada dasarnya merupakan keterpaduan antara kesabijaksanaan, humanis, dan ekologis. Dengan demikian keterpaduan pengelolaan pariwisata yang berbasis ekonomi, masyarakat, dan lingkungan ini dilakukan secara utuh serta menyeluruh. Lebih jauh, hal ini dimaksudkan agar selain nilai ekonomis didapat oleh masyarakat setempat dan pengelola pariwisata, juga kesinambungan pariwisata di Pangandaran dapat berlangsung dengan baik. Semoga!

## KEPUSTAKAAN

- Boo, Elizabeth. (1991). *Ecotourism: The Potential and Pitfall 1 & 2*. Washington DC.: Wickersham Printing Co, Inc.
- Broum, Michael C. (1993). Planning for Ecotourism. *Environmental and Development*. Washington D.C.: APA.
- Bovy, Baud. (1977). *Tourism and Recreation Development*. Boston, Massachusetts: CBI Pub. Co. Inc.
- Direktorat Jenderal Pariwisata (1986). *Indonesia: Buku Petunjuk Wisata*. Jakarta.
- Human Development Report 1993. *UNDP*. New Delhi: Oxford University Press, Bombay Calcutta Madras.
- Harris, J.E. dan Nelson, J.G. (1993). Monitoring Tourism from Whole Economy Perspective: A Case from Indonesia. *Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning, and Managing*. Departem of Geography Pub. Series (37) University of Waterloo. Pp. 179-200.
- Hayati, Sri (1996). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Pangandaran Jawa Barat. *Tesis*. Jakarta: IKIP.
- Kantor Meneg LH dan KONPHALINDO (1995). *Atlas Keanekaragaman Hayati di Indonesia*. Jakarta.
- Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. (April, 1989). Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi: Tinjauan dalam Perspektif Indonesia. *Economica* (5). Hal. 37-58.
- Lindberg, Kreg & Hawkins, Donald E (ed.). (1995). *Ekoturisme: Petunjuk untuk Perencanaan dan Pengelolaan*. Terjemahan. Nort Bennington: The Ecotourism Society.
- Naisbitt, John. (1994). *Global Paradox*. Terjemahan. Jakarta: Gramedia.

- Pendit, Nyoman S. (1986). *Ilmu Kepariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Perolehan Devisa US\$ 2,9 Milyar Tahun 1993/1994. (1992, 19 September).. *Business News*. Halaman 9-10.
- Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam 1994/95-1998/99. *Buku III*. Jakarta: Kantor Mensekneg
- Sadar lingkungan Sadar Wisata. (1994, 19 Desember). *Kompas*. Halaman 10.
- Wahyudin, Dinn (1995). Potret Pariwisata Paradoksal. *Kompas*. 7 Januari. Halaman 5.
- Wilkinson, Paul F. (1991). *Perspective on Tourism in Indonesia*. Bandung: PPLH-ITB.
- & Gunawan, Myra P. (1991). *The Changing of Tourism in Indonesia Opportunities and Constrains*. Bandung: PPLH-ITB.
- Van Bemmelen, R.W. (1968). *Geologi Indonesia Jilid I*, Yogyakarta: Percetakan Cepat.